



PERIHAL ETIKA DAN INTEGRITAS PENGAWAS PEMILU

Tantangan Kelembagaan Dalam
Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

ERWIN FRANKLIN SUMAMPOUW
THEODORUS PANGALILA

Perihal Etika dan Integritas Pengawas Pemilu: Tantangan Kelembagaan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

**Erwin Franklin Sumampouw, S.P., M.AP.
Prof. Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., S.H.,
M.Pd.**



PT. NALURI EDUKASI PRESS

Perihal Etika dan Integritas Pengawas Pemilu: Tantangan Kelembagaan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

Penulis:

Erwin Franklin Sumampouw, S.P., M.AP
Prof. Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., S.H., M.Pd

ISBN: 978-623-10-7592-5

Editor : Dr. Wenly R.J. Lolong, S.H., M.H.
Penyunting : Dr. Wenly R.J. Lolong, S.H., M.H.
Desain sampul : Dr. Wenly R.J. Lolong, S.H., M.H.

Penerbit
PT. NALURI EDUKASI PRESS

Redaksi
Jl. Piai Tengah, Nomor 29, Kelurahan Piai Tengah,
Kecamatan Pauh, Kota Padang-Sumatera Barat

Distributor Tunggal
PT. NALURI EDUKASI PRESS
Jl. Piai Tengah, Nomor 29, Kelurahan Piai Tengah,
Kecamatan Pauh, Kota Padang-Sumatera Barat

Cetakan Pertama, Maret 2025

Hak Cipta © 2025 by PT. NALURI EDUKASI PRESS

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA SAMBUTAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik hadirnya buku berjudul "Perihal Etika dan Integritas Pengawas Pemilu: Tantangan Kelembagaan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah" ini. Karya ini hadir di saat yang krusial, ketika bangsa kita tengah menghadapi tantangan dalam menjaga integritas proses demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah merupakan manifestasi demokrasi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan kemajuan daerah. Namun, kompleksitas persoalan yang menyertainya menuntut adanya pengawasan yang efektif, berintegritas, dan profesional. Di sinilah peran vital Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sesungguhnya menjadi begitu bermakna.

Penulis nampaknya telah mengupas secara komprehensif berbagai aspek etika dan integritas yang menjadi tantangan bagi para pengawas pemilu. Dengan analisis yang tajam dan mendalam, penulis membedah kompleksitas persoalan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, mulai dari ancaman terhadap independensi, godaan suap dan gratifikasi, tekanan politik, intimidasi dan ancaman keamanan, hingga potensi manipulasi dan penyalahgunaan wewenang. Karya ini tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, namun juga menawarkan solusi konkret dan strategi penguatan kelembagaan yang aplikatif.

Signifikansi buku ini terletak pada kontribusinya dalam mengisi kesenjangan literatur tentang etika dan integritas pengawas pemilu di Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum,

politik, dan manajemen organisasi, karya ini menawarkan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi tantangan etika dalam pengawasan pemilu. Dari segi praktis, buku ini menyajikan rekomendasi yang berbasis bukti dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja dan integritas Bawaslu.

Analisis mendalam tentang dilema etis yang dihadapi pengawas pemilu di lapangan memberikan wawasan berharga bagi para praktisi dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengawasan yang lebih efektif dan berintegritas. Buku ini juga membahas secara kritis peran teknologi informasi dalam pengawasan pemilu modern, serta tantangan baru yang muncul di era digital seperti penyebaran hoaks dan manipulasi data pemilih secara online.

Karya ini menekankan pentingnya pengembangan budaya organisasi yang beretika di lingkungan Bawaslu. Penulis berargumen bahwa penguatan etika dan integritas tidak cukup hanya melalui regulasi dan sanksi, tetapi juga membutuhkan internalisasi nilai-nilai moral dan profesional dalam diri setiap pengawas pemilu. Strategi-strategi inovatif seperti program mentoring, pelatihan etika berkelanjutan, dan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dibahas secara mendalam sebagai upaya membangun budaya integritas yang berkelanjutan.

Saya berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi wajib bagi jajaran Bawaslu, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses demokrasi kita. Politisi, akademisi, jurnalis, hingga masyarakat umum akan mendapatkan perspektif yang mendalam tentang tantangan dan upaya mewujudkan pemilu yang

berintegritas. Karya ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi diskusi publik yang lebih luas tentang peran vital pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada para penulis atas karya ilmiah yang monumental ini. Semoga buku ini menjadi sumbangsih nyata bagi penguatan demokrasi Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pilkada yang jujur, adil, dan bermartabat. Selamat membaca dan semoga karya ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Manado, Maret 2024

Dr. Ardiles M.R. Mewoh, S.IP., M.Si.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

KATA PENGANTAR

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu perwujudan demokrasi di tingkat lokal yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan kemajuan daerah. Sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, pilkada menjadi arena kontestasi politik yang sarat dengan berbagai kepentingan. Di sinilah peran pengawas pemilu menjadi sangat krusial untuk memastikan proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk pilkada, dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga integritas proses pemilihan. Salah satu isu fundamental yang perlu mendapat perhatian serius adalah etika dan integritas pengawas pemilu itu sendiri. Tanpa landasan etika yang kuat dan integritas yang tak tergoyahkan, pengawasan pemilu berpotensi menjadi formalitas belaka yang justru dapat mencederai nilai-nilai demokrasi yang hendak dijunjung tinggi.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek terkait etika dan integritas pengawas pemilu, khususnya dalam konteks pengawasan pilkada. Melalui pembahasan yang komprehensif, buku ini mengupas konsep dan ruang lingkup etika pengawas pemilu, mengidentifikasi tantangan dan dilema etis yang dihadapi, serta menawarkan strategi penguatan etika dan integritas kelembagaan Bawaslu.

Dengan menghadirkan analisis yang tajam dan rekomendasi yang aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi para pengawas pemilu, penyelenggara pilkada, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Lebih jauh, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya membangun sistem pengawasan pemilu yang berintegritas, sehingga mampu menghasilkan pilkada yang berkualitas dan pemimpin daerah yang legitimasinya tidak terbantahkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas dan bermartabat.

Manado, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB 1 – PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERSOALAN	1
BAB 2 – KONSEP ETIKA DAN INTEGRITAS DALAM KONTEKS PENGAWASAN PEMILU	16
A. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP ETIKA PENGAWAS PEMILU	16
BAB 3 – DILEMA ETIS DALAM PENGAWASAN PILKADA	30
A. POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN	30
BAB 4 – TANTANGAN INTEGRITAS DALAM PENGAWASAN PILKADA	31
A. ANCAMAN TERHADAP INDEPENDENSI PENGAWAS	31
BAB 5 – STRATEGI PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS KELEMBAGAAN	67
A. PENGEMBANGAN BUDAYA ORGANISASI BERETIKA.....	67
BAB 6 – PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENEGAKKAN ETIKA DAN INTEGRITAS	91
A. KETELADANAN PIMPINAN DALAM BERPERILAKU	91
A. PROGRAM PENGEMBANGAN KARAKTER DAN INTEGRITAS	119
BAB 8 – IMPLEMENTASI HUKUM DAN KEBIJAKAN	134
A. ANALISIS KEBUTUHAN PENGUATAN REGULASI TERKAIT ETIKA PENGAWAS.....	134

BAB 9 – PENUTUP	151
DAFTAR PUSTAKA	154
TENTANG PENULIS	170
TENTANG PENULIS	172

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku ini mengupas tuntas etika dan integritas pengawas pemilu dalam konteks pengawasan Pilkada di Indonesia, menyoroti tantangan etis yang dihadapi Bawaslu, dan mengusulkan strategi penguatan kelembagaan. Pilkada, sebagai perwujudan demokrasi lokal, rentan terhadap pelanggaran, sehingga peran Bawaslu sangat krusial. Etika dan integritas pengawas menjadi fondasi pengawasan yang efektif dan terpercaya. Buku ini mengidentifikasi berbagai tantangan etis, seperti konflik kepentingan, tekanan politik, suap, ancaman independensi, intimidasi, manipulasi wewenang, serta kebocoran informasi. Untuk mengatasi hal ini, diusulkan strategi penguatan kelembagaan Bawaslu melalui pengembangan budaya organisasi beretika, program pelatihan etika berkelanjutan, sistem pelaporan pelanggaran yang efektif, dan penguatan pengawasan internal. Rekomendasi utamanya meliputi internalisasi nilai-nilai integritas, pengembangan kode etik komprehensif, pelatihan etika rutin, sistem pelaporan yang mudah diakses dan melindungi pelapor, serta penguatan mekanisme pengawasan yang mempertimbangkan aspek etika. Penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan integritas Bawaslu, kepercayaan publik, serta efektivitas pengawasan demi Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.

BAB 1 – Pendahuluan

A. Gambaran Umum Persoalan

Pemilu memiliki urgensi yang fundamental dalam sistem demokrasi modern karena berperan sebagai pilar utama perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagai mekanisme konstitusional, pemilu memungkinkan warga negara secara langsung menentukan arah pemerintahan melalui pemilihan wakil rakyat dan pemimpin politik, sehingga memberikan legitimasi yang kuat kepada pemerintah terpilih. Proses ini menjamin bahwa kekuasaan politik berasal dari mandat rakyat, bukan dari kekuatan koersif atau klaim sepihak. Selain itu, pemilu berfungsi sebagai sarana rotasi kekuasaan yang damai, mencegah monopoli kekuasaan dan meminimalisasi potensi konflik politik melalui prosedur hukum yang terstruktur.

Di sisi lain, pemilu juga menjadi instrumen penting dalam membangun partisipasi politik masyarakat, di mana keterlibatan aktif warga negara dalam pemilihan tidak hanya memperkuat kesadaran demokratis, tetapi juga menciptakan akuntabilitas pemimpin melalui mekanisme evaluasi periodik. Lebih dari sekadar ritual politik, pemilu yang berintegritas berperan sebagai penjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dengan memastikan pemerintahan yang terbentuk sesuai dengan kehendak mayoritas, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak minoritas melalui prinsip keadilan prosedural. Dalam konteks yang lebih luas, pemilu yang transparan dan inklusif menjadi fondasi bagi pembangunan tata kelola negara yang

BAB 2 – Konsep Etika dan Integritas Dalam Konteks Pengawasan Pemilu

A. Definisi dan Ruang Lingkup Etika Pengawas Pemilu

Definisi dan ruang lingkup etika pengawas pemilu merupakan aspek penting dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Etika pengawas pemilu dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku bagi pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dapat pula diartikan sebagai standar perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh pengawas pemilu untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan profesionalitas dalam pengawasan pemilu.

Etika pengawas pemilu adalah fondasi penting dalam menjaga integritas demokrasi, yang didefinisikan sebagai seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang membimbing perilaku pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Standar perilaku ini menjadi kompas untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan profesionalitas dalam pengawasan pemilu. Ruang lingkungannya meliputi netralitas, imparialitas, integritas, profesionalisme, independensi, transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap

BAB 3 – Dilema Etis Dalam Pengawasan Pilkada

A. Potensi Konflik Kepentingan

Dilema etis dalam pengawasan Pilkada terkait erat dengan potensi konflik kepentingan yang dapat muncul di kalangan pengawas pemilu diantaranya meliputi potensi konflik kepentingan. Beberapa bentuk potensi konflik kepentingan yang dapat muncul dalam pengawasan Pilkada meliputi:

- a. Hubungan pribadi atau kekerabatan antara pengawas dengan peserta atau penyelenggara Pilkada (Alfa & Fahmi, 2022).
- b. Godaan untuk menerima suap atau melakukan praktik korupsi (Alfa & Fahmi, 2022)
- c. Tekanan politik dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi independensi pengawas (Alfa & Fahmi, 2022).
- d. Keterlibatan pengawas dalam kontrak atau kegiatan yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya (John Pelissero, 2023).

Konflik kepentingan sendiri dapat berdampak serius pada integritas proses pengawasan Pilkada. Konflik kepentingan dapat menurunkan objektivitas dan profesionalisme pengawas dalam menjalankan tugasnya. Selain daripada itu dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada. Juga dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran etika dan regulasi kepemiluan.

BAB 4 – Tantangan Integritas Dalam Pengawasan Pilkada

A. Ancaman Terhadap Independensi Pengawas

Beberapa ancaman utama terhadap independensi pengawas pemilu dalam pilkada, antara lain:

1. Intervensi Politik. Salah satu ancaman serius adalah adanya intervensi atau tekanan politik terhadap pengawas pemilu. Beberapa bentuknya meliputi (Cheeseman et al., 2020):
 - a. Penunjukan komisioner yang memiliki afiliasi politik kuat.
 - b. Intimidasi terhadap komisioner melalui ancaman dan peringatan.
 - c. Penolakan pemimpin politik untuk mematuhi keputusan pengawas pemilu meskipun memiliki kewenangan formal.
2. Keterbatasan Wewenang. Pengawas pemilu seringkali menghadapi kendala keterbatasan wewenang dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran (Elviandri & Safitri, 2023):
 - a. Rekomendasi pengawas pemilu tidak bersifat final dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
 - b. Adanya perbedaan interpretasi regulasi antara KPU dan Bawaslu terkait tindak lanjut rekomendasi pelanggaran administratif.

BAB 5 – Strategi Penguatan Etika dan Integritas Kelembagaan

A. Pengembangan Budaya Organisasi Beretika

Pengembangan budaya organisasi beretika menjadi fondasi utama bagi penguatan etika dan integritas di lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, karena etika dan integritas tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan harus tumbuh dari dalam diri setiap individu dan menjadi bagian dari identitas kolektif organisasi. Budaya organisasi yang beretika menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi pedoman perilaku sehari-hari. Dalam konteks Bawaslu, hal ini berarti bahwa setiap pengawas pemilu harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan tanpa memihak kepada kepentingan apapun kecuali kebenaran dan keadilan. Budaya organisasi beretika membantu menciptakan sistem nilai yang konsisten dan koheren, sehingga memudahkan para anggota organisasi untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi yang kompleks atau ambigu.

BAB 6 – Peran Kepemimpinan Dalam Menegakkan Etika dan Integritas

A. Keteladanan Pimpinan Dalam Berperilaku

Keteladanan pimpinan merupakan aspek penting dalam peran pemimpin untuk menegakkan etika dan integritas dalam organisasi. Terdapat beberapa poin kunci terkait hal ini antara lain:

1. Pemimpin sebagai role model etis. Pemimpin memiliki peran krusial sebagai teladan etis bagi anggota organisasi. Brown et al. mendefinisikan kepemimpinan etis sebagai "demonstrasi perilaku yang sesuai norma melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal, serta promosi perilaku tersebut kepada pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan pengambilan keputusan" (Vaja, 2017). Dengan menunjukkan perilaku etis secara konsisten, pemimpin dapat memotivasi anggota untuk mengadopsi standar etika yang sama.

Membangun budaya etis organisasi. Keteladanan pemimpin berperan penting dalam membentuk

BAB 7 – Kebijakan Strategis

A. Program Pengembangan Karakter dan Integritas

Pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum dan pembelajaran merupakan strategi penting dalam penguatan etika lembaga. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain (Anik Ghufron, 2010):

- a. Merumuskan nilai-nilai karakter inti yang akan dikembangkan, seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan kepedulian.
- b. Mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam rencana pembelajaran dan kegiatan.
- c. Menggunakan metode pembelajaran yang mendukung pengembangan karakter, seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi.

Sementara itu hal lain yang perlu dilakukan yakni pengembangan budaya organisasi beretika. Membangun budaya organisasi yang mendukung etika dan integritas merupakan langkah strategis dalam penguatan etika lembaga (Arwiyah et al., 2020):

- a. Merumuskan dan menginternalisasikan nilai-nilai inti organisasi yang menjunjung tinggi integritas. Pemimpin berperan sebagai teladan dalam menerapkan standar etika tertinggi. Menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku etis dan berintegritas.

BAB 8 – Implementasi Hukum dan Kebijakan

A. Analisis kebutuhan penguatan regulasi terkait etika pengawas

Kebutuhan penguatan regulasi terkait etika pengawas pemilu sangat diperlukan dalam rangka membangun kelembagaan pengawas pemilu yang berintegritas. Upaya ini mencakup beberapa area kunci yang perlu menjadi fokus perhatian untuk menciptakan kerangka etika yang lebih kuat dan efektif.

Penyempurnaan kode etik pengawas pemilu merupakan langkah awal yang krusial. Kode etik yang ada perlu direvisi agar lebih komprehensif, mencakup prinsip-prinsip dasar seperti integritas, profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas. Selain itu, perlu dirumuskan standar perilaku yang lebih rinci dalam pelaksanaan tugas pengawasan, serta mekanisme penegakan kode etik yang lebih efektif. Hal ini akan memberikan panduan yang jelas bagi pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya.

Penguatan mekanisme penanganan pelanggaran etika juga menjadi aspek penting yang perlu diatur lebih lanjut. Regulasi harus mencakup prosedur pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran etika yang lebih jelas dan terstruktur. Bawaslu perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat dalam menindak pelanggaran etika di tingkat

BAB 9 – Penutup

Etika dan integritas pengawas pemilu merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Melalui pembahasan yang telah dilakukan, terlihat jelas bahwa tantangan yang dihadapi dalam menegakkan etika dan integritas pengawas pemilu sangatlah kompleks dan multidimensi. Mulai dari potensi konflik kepentingan, tekanan politik, godaan suap dan gratifikasi, hingga ancaman terhadap keamanan individu pengawas, semuanya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penguatan etika dan integritas kelembagaan Bawaslu tidak bisa dilihat sebagai upaya yang terpisah, melainkan harus menjadi bagian integral dari seluruh aspek operasional lembaga. Pengembangan budaya organisasi yang beretika, implementasi program pelatihan dan sosialisasi etika yang berkelanjutan, serta penguatan mekanisme pengawasan internal merupakan langkah-langkah strategis yang harus dijalankan secara simultan dan konsisten. Peran kepemimpinan dalam hal ini menjadi sangat krusial, di mana keteladanan pimpinan dalam berperilaku etis akan menjadi panutan dan inspirasi bagi seluruh jajaran pengawas pemilu.

Namun demikian, upaya penguatan etika dan integritas pengawas pemilu bukanlah tanggung jawab Bawaslu semata. Diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa. Sinergi antar

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Kao, R., Dewi, S., Jay Lawwin, Natashya, May Leen, Kerrine, Herman, Inne Dasilva Angel, Tracy Olivia, Sofia, Kerdion Gilbert, Sherly Anggelina Ng, Indah Khairunnisa, Louis Cedric Tioputra, Nelson Fernando, Christopher, Liony Febriana, & Jacky Saputra. (2024). Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kecurangan: Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia. *JCRD: Journal of Citizen Research and Development*, 1(2), 18. <https://rayyanjournal.com/index.php/jcrd/article/download/3550/pdf>
- Ahmad Fahrezy, R., Zaafril Lazuardi, M., & Catharina Aprilia Hellyani, dan. (2024). Analisis Strategi Gaya Kepemimpinan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan UMKM. *Seminar Nasional 2024: Ekonomi Dan Bisnis Volume 4*, 4, 299–309. <https://ocs.machung.ac.id/index.php/seminarnasion/alamanajemenakuntans/article/download/479/353/2694>
- Aldy, R. (2022). Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang Independen Dan Partisipatif. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 107–126. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.30475>
- Alfa, P., & Fahmi, K. (2022). Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Journal*

of Social and Policy Issues, 2(2).
<https://doi.org/10.35308/xxxxx>

Anik Ghufron. (2010). Integrasi Nilai-nilai Karakter Bangsa pada Kegiatan Pembelajaran. *Jurnal UNY*, 3.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/230/145>

Arar, K., & Saiti, A. (2022). Ethical leadership, ethical dilemmas and decision making among school administrators. *Equity in Education & Society*, 1(1), 126–141.
<https://doi.org/10.1177/27526461211070828>

Arwiyah, Y., Machfiroh, R., & Rahmansyah, A. (2020). Model of Strengthening Student Integrity as Anti-Corruption Education Through Organizational Culture Based on Creative Media. *Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*. <https://www.atlantispress.com/article/125937484.pdf>

Azhar Ridhanie. (n.d.). *Strategi Pengawas Pemilu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu: Implementasi Hukum Progresif dan Penerapan Pasal 55 KUHP dalam Penanganan Perkara Pidana di Kalimantan Selatan*. Bawaslu Kalsel. Retrieved February 9, 2025, from <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/>

Bate, A. M. F. F., & Bate, A. N. I. (2024). Press supervision of local election (Pilkada) transparency in South Sulawesi. *Tamalanrea: Journal of Government and*

Development (JGD), 1(3), 26–38.
<https://doi.org/10.69816/jgd.v1i3.42420>

Bawaslu. (2024, January). *Inspektorat Utama*. Bawaslu.
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/inspektorat-utama>

Budi Santoso, Agus Hidayat, & Tuti Andriani. (2023). The Influence of Leadership Styles on Employee Motivation and Organizational Performance in the Service Sector. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 01–05.
<https://doi.org/10.61132/ijema.v1i1.316>

Cheeseman, N., Elklit, J., & Elklit -, J. (2020). *Understanding and Assessing Electoral Commission Independence: a New Framework*.
https://www.wfd.org/sites/default/files/2022-01/WFD_A-new-framework-for-understanding-and-assessing-electoral-comission-independence.pdf

Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. (2018). *Conflicts of Interest at Local and Regional Levels Public Ethics*.
<https://rm.coe.int/booklet-a6-conflicts-of-interest-coll-public-ethic-en/1680907923>

Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. (2019). *Administrative resources and fair elections A practical guide for local and regional politicians and public officials Public Ethics*.
<https://rm.coe.int/booklet-a6-en-administrative-resources-and-fair-elections-public-ethic/1680931f6c>

- Delmana, L. P. (2023). STRATEGI PENANGANAN HOAKS PEMILU MELALUI PENERAPAN SMART CONTRACT LOGIC SERTA SISTEM DETEKSI HOAKS OTOMATIS. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272219622>
- Elviandri, & Safitri, N. (2023). *Strengthening Quasi-Judicial Authority Election Supervisory Body (BAWASLU)*. 1(1), 51–58. <https://doi.org/10.12928/adil.v1i1.575>
- Faiz Rahman. (2023, December 19). *Personal Data Leaks Protection of Personal Data and Election Integrity*. Kompas.
<https://www.kompas.id/baca/english/2023/12/18/en-pelindungan-data-pribadi-dan-integritas-pemilu>
- Fatih, I. Z. Al. (2024). Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik di Indonesia Lima Tahun Terakhir: Antara Demokrasi dan Manipulasi Informasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:274363696>
- Fenny Ramadani, T., Marcellah, A., & Mukhtar, A. (2024). Eksplorasi Konsep dan Model Kepemimpinan dalam Manajemen Strategik. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(2).
<https://pdfs.semanticscholar.org/e2d7/2a285eda096eb0c1a8da9fae826d6a16703f.pdf>
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PAMEKASAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU 2019. *REFORMASI*, 10(2), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>

Hafiz, M., Pertiwi, D., Putri, S. E., & Nofrianti, M. (2023). TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi pada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya). *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11204>

Hendi Purnawan. (2024, February 2). *Bawaslu Akan Beri Sanksi Jajaran Pengawas yang Langgar Integritas*. Bawaslu. <https://www.bawaslu.go.id/id/content/bawaslu-akan-beri-sanksi-jajaran-pengawas-yang-langgar-integritas>

Humas DKPP. (2024). *Heddy Lugito Tekankan Pentingnya Integritas dan Etika Bagi Pengawas Pemilu*. DKPP. <https://dkpp.go.id/heddy-lugito-tekanan-pentingnya-integritas-dan-etika-bagi-pengawas-pemilu/>

Humas UNS. (2020, December 11). *Conducting Regional Election with High Integrity, The Urgency of Stakeholder Participation and Public Trust*. UNS. <https://uns.ac.id/en/conducting-regional-election-with-high-integrity-the-urgency-of-stakeholder-participation-and-public-trust/>

Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari, F. (2021). *Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap*

Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 57–78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>

ICW. (2013, November 13). *Panwaslu Tindaklanjuti Kasus Dugaan Politik Uang*. ICW. <https://antikorupsi.org/id/article/panwaslu-tindaklanjuti-kasus-dugaan-politik-uang>

ICW. (2024a). *Dana Kampanye Pilkada 2024: Celah Pendanaan Gelap Terbuka Lebar*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/dana-kampanye-pilkada-2024-celah-pendanaan-gelap-terbuka-lebar>

ICW. (2024b, July 31). *Dana Hibah Pilkada Rawan Korupsi, Pengawasan Harus Diperketat!* ICW. Dana Hibah Pilkada Rawan Korupsi, Pengawasan Harus Diperketat!

Indah Nurul Ainiah. (2025). *Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Mencegah Praktik Money Politic*. Umsida. <https://ap.umsida.ac.id/pengawasan-mencegah-praktik-money-politic/>

Irwan. (2019, March 28). *Hati-hati, Mengintimidasi Pemilih Gunakan Hak Pilihnya Bisa di Pidana dan Denda*. Bawaslu. <https://bawaslu.go.id/id/berita/hati-hati-mengintimidasi-pemilih-gunakan-hak-pilihnya-bisa-di-pidana-dan-denda>

John Pelissero. (2023). *Five Common Conflicts of Interest in Government and How to Prevent Them*. Santa Clara University. <https://www.scu.edu/government->

ethics/resources/five-common-conflicts-of-interest-in-government-and-how-to-prevent-them/

Join The Collective. (2023). *How to Integrate Ethical Principles into Your Organizations DNA*. Join The Collective.

<https://www.jointhecollective.com/article/cultivating-an-ethical-organizational-culture/>

Junaedi Seto Saputro. (2024, January 3). *Pentingnya Netralitas Pegawai ASN Menjaga Persatuan dan Kesatuan untuk Pemilu Damai*. DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16769/Pentingnya-Netralitas-Pegawai-ASN-Menjaga-Persatuan-dan-Kesatuan-untuk-Pemilu-Damai.html>

Juwita, Muhammad Soutan Joefrian, Andri Rusta, Irawati, & Mhd Fajri. (2023). Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 7(12). <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/4479>

Klebe, L., Michael, T., & Brown, E. (2000). *The Role of Leaders in Influencing Unethical Behavior in the Workplace*. Vardi & Wiener.

Kompas. (2018, February 26). *Kasus Suap Anggota KPU dan Bawaslu Ancam Demokrasi*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/02/26/kasus-suap-anggota-kpu-dan-bawaslu-ancam-demokrasi>

- KPK. (2023, November 13). *Kerawanan Korupsi oleh Penyelenggara Pemilu, Ini Jenis-Jenisnya!* KPK. Kerawanan Korupsi oleh Penyelenggara Pemilu, Ini Jenis-Jenisnya!
- KPU. (2020, February 10). *Kenali Jenis Gratifikasi Laporkan Sesuai Ketentuan.* KPU. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/8242/Undang-undang-UU--Nomor-31-Tahun-1999-dan-UU-Nomor-20-Tahun-2001-memuat-definisi-gratifikasi-sebagai-pemberian-dalam-arti-luas.-Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--juga-mempunyai-regulasi-yaitu-Peraturan-KPU-Nomor-15-Tahun-2015->
- KPU Sumut. (2021, November 22). *Workshop Pengendalian Gratifikasi KPU Sumut.* KPU Sumut. <https://sumut.kpu.go.id/blog/read/workshop-pengendalian-gratifikasi-kpu-sumut>
- Lia Ulvi Miranata Putri, Ayu Pebrianti, Yesika Elonika, & Novi Winarti. (2024). *Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda.* <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21741>
- Masianoga, E. S., & Govender, K. K. (2023). Ethical Leadership and Employee Creative Behaviour: A Case Study of a State-Owned Enterprise in South Africa. *International Journal of Professional Business Review*, 8(6), e0748. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i5.748>

- Muhammad Iqbal Khatami, & Rahayu. (2024). Cybersecurity Leadership in Safeguarding Election Voter Data (Case Study: Implementation of the SIDALIH Information System by the Indonesian General Election Commission). *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 13(1).
<https://doi.org/10.7454/jkmi.v13i1.1215>
- Muktamar, A. (2023). The role of ethical leadership in organizational culture. *Jurnal Mantik*, 7(1), 2685–4236.
<https://pdfs.semanticscholar.org/4ae5/4af5259e507c22ca74cbd8131202705df52d.pdf>
- Nasir, J., Ibrahim, R. M., Sarwar, M. A., Sarwar, B., Al-Rahmi, W. M., Alturise, F., Samed Al-Adwan, A., & Uddin, M. (2022). The Effects of Transformational Leadership, Organizational Innovation, Work Stressors, and Creativity on Employee Performance in SMEs. *Frontiers in Psychology*, 13.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.772104>
- Nikolaus Harbowo, & Prayogi Dwi Sulistyو. (2022). *Tutup Celah Intervensi Politik dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah*. Kompas.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/18/tutup-celah-intervensi-politik-dalam-pemilihan-penjabat-kepala-daerah>
- Nugraha, A., Utomo, S., Sebayang, A., Septinawati, A., Agnesia, R., & Sirait, M. (2024). Urgensi Pendidikan Pengawasan Pemilu Demi Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil Serta Berintegritas di Kota Pontianak. *Jurnal*

Kolaboratif Sains, 7(1).
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4479>

Oliveira, M., Gamito, P., Conde, A. R., Souto, T., Dias, F., Alves De Sousa, J., Ricou, M., & Marina, S. (2021). *Ethical decision-making training goes virtual*.
<https://pdfs.semanticscholar.org/9c07/2bdfdd16c102ea47ffa80fdd9c2df0547918.pdf>

Prasetyo, R. E. (2023). Pengawasan Partisipatif: Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 Berkualitas dan Berintegritas. *Jurnal Trias Politika*, 1(1).
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/26559/9134>

Pratiwi Eka Putri. (2018a). *Bawaslu Tidak Intervensi Kasus Korupsi Calon Kepala Daerah*. Bawaslu.
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tidak-intervensi-kasus-korupsi-calon-kepala-daerah>

Pratiwi Eka Putri. (2018b, March 14). *Bawaslu Tidak Intervensi Kasus Korupsi Calon Kepala Daerah*. Bawaslu.
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tidak-intervensi-kasus-korupsi-calon-kepala-daerah>

Priyambudi Sulistiyanto. (2020). Local Elections and Local Politics in Indonesia: Emerging Trends. *Journal of Asian Social Science Research*, 2(2).
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2468238&val=23517&title=Local+Elections+and+Local+Politics+in+Indonesia+Emerging+Trends>

- Purnomo, D., Prayito, M., Setyawati, R. D., & Happy, N. (2019). Implementation of Affective Domain Evaluation Tool Assisted Macros Program. *1st International Conference on Education and Social Science Research (ICESRE 2018)*. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icesre-18/55912217>
- Qurrotu, N., Zummi, A., Tomo, S. W., & Sulistyosari, Y. (2020). Teaching Social Studies Education to Foster Civic Characters at the Secondary School in Indonesia: A Review. *International Conference on Social Science and Character Educations (ICoSSCE 2019)*. <https://www.atlantis-press.com/article/125933384.pdf>
- Rahmadan, D. (2012). Tinjauan Yuridis Sosiologis Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 1(1). <https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK>
- Redaksi. (2024). *Tekanan Koalisi Pemenang Pilpres dan Pilkada yang Kartelistik: Wawancara Khusus Rosi dengan Prof. Saiful Mujani di Kompas TV*. Saiful Mujani Research and Consulting. <https://saifulmujani.com/tekanan-koalisi-pemenang-pilpres-dan-pilkada-yang-kartelistik-wawancara-khusus-rosi-dengan-prof-saiful-mujani-di-kompas-tv/>
- Reyn Gloria. (2022). *Minta Dukungan Pemangku Kepentingan, Bagja Ungkapkan Potensi Konflik Pemilu 2024*. Bawaslu. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/minta->

dukungan-pemangku-kepentingan-bagja-ungkapkan-potensi-konflik-pemilu-2024

- Rifai, & Haeril. (2024). Dilema Etis dan Imparsialitas Birokrasi pada Pilkada Serentak Kota Bima 2024. *Journal of Governance and Local Politics*, 6(2). <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/download/1554/881/>
- Risnain, M. (n.d.). Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas. *Jurnal Etika Dan Pemilu*. Retrieved February 9, 2025, from <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/download/4/3/3>
- Robi Ardianto. (2021). *Integritas Penyelenggara Pemilu, Abhan: Parameternya Kode Etik yang Lahirkan Wibawa Kelembagaan*. Bawaslu. <https://bawaslu.go.id/id/berita/integritas-penyelenggara-pemilu-abhan-parameternya-kode-etik-yang-lahirkan-wibawa-kelembagaan>
- Sadam, M., Araafi, A. F., & Arafah, Y. (2024). Demokrasi dan Transformasi Digital: Analisis Digitalisasi Politik Melalui Penerapan E-Voting Dalam Meningkatkan Mutu Demokrasi. *Politika*, 15(2). <https://doi.org/10.14710/politika.15.2.2024.218-235>
- Silalahi, W. (2022). Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83.

https://ejurnal.kepri.bawaslu.go.id/upload/cover_jurnal/1658805162138.pdf

Siti Yona Hukmana. (2024, August 18). *Jaksa Diingatkan Tak Terpengaruh Tekanan Politik di Pilkada 2024*. Metro TV.

<https://www.metrotvnews.com/read/bw6Co04m-jaksa-diingatkan-tak-terpengaruh-tekanan-politik-di-pilkada-2024>

Sri Nuryanti. (2015). Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(2). <https://media.neliti.com/media/publications/101656-ID-intervensi-penyelenggaraan-pemilukada-re.pdf>

Sukimin. (2023). *Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia*.

<https://pdfs.semanticscholar.org/f610/11a865e9d3c4baac4b01501c06b276d10acd.pdf>

Sukmawan, D. I., & Pratama, S. (2023). Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 556–575. <https://doi.org/10.31078/jk2041>

Sukmawan, D. I., & Setyawan, D. P. (2022). Hacker, Fear, and Harm: Data Breaches and National Security Peretas, Ketakutan, dan Kerugian: Pelanggaran Data dan Keamanan Nasional. *Global Strategis*, 17(1). <https://pdfs.semanticscholar.org/8bb9/e52bd809b27d7badd18f517019dbcb3cae1a.pdf>

- Susan Febriantina, Jennah Marsha Sanjaya, Nadiva Azzahra, Thabita Salsabila, & Vidya Indah Nurhafiza. (2024). Etika Kepemimpinan dalam Membentuk Budaya Organisasi yang Berintegritas. *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 187–195. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2093>
- Syahril Ramadhan, Bukhari Muslim, Yanti Aneta, & Efa Irdhayanti. (2024). *Transformasi Budaya Organisasi Membangun Kesuksesan Melalui Perubahan Budaya*. Media Penerbit Indonesia.
- Tariq Tawfeeq Yousif Alabdullah, & Amal Jasim Mohamed AL-Qallaf. (2023). The Impact Of Ethical Leadership On Firm Performance In Bahrain: Organizational Culture As A Mediator. *Cashflow*, 2(4). [https://ojs.transpublika.com/index.php/CASHFLOW /](https://ojs.transpublika.com/index.php/CASHFLOW/)
- Tempo. (2024, February 16). *Bawaslu Ungkap Adanya Ancaman kepada Pemilih dan Petugas Pemilu di 2.632 TPS*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-ungkap-adanya-ancaman-kepada-pemilih-dan-petugas-pemilu-di-2-632-tps-86647>
- Toseef, M., Kiran, A., Zhuo, S., Jahangir, M., Riaz, S., Wei, Z., Ghauri, T. A., Ullah, I., & Ahmad, S. B. (2022). Inspirational Leadership and Innovative Communication in Sustainable Organizations: A Mediating Role of Mutual Trust. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.846128>

- Ubaidillah. (2024). *Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:270009665>
- Vaja, J. R. (2017). Ethical Leadership in the Digital Age: Assessing the Role of Leaders in Nurturing Ethical Behavior in Technology-Driven Organizations. *Journal of Management and Development Studies*, 6(10), 118–126.
- Wathoni, S., Indarinul Mufidah, L., & Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nganjuk, S. (2024). Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 16–28. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.982>
- Wijesekera, A. T., & Fernando, R. L. S. (2018). Ethical Leadership Measures for Public Service in Sri Lanka. *International Business Research*, 11(7), 106. <https://doi.org/10.5539/ibr.v11n7p106>

Tentang Penulis



Erwin Franklin Sumampouw, SP, M.AP. Lahir di Tondano pada 22 Februari 1977. Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar di SD GMIM Wulauan pada tahun 1989, dilanjutkan dengan SMP Negeri 3 Tondano pada 1992, dan SMA Kristen Tomohon pada 1995. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Pertanian, yang diselesaikan pada tahun 2003. Terakhir, ia menempuh pendidikan Magister Administrasi Publik di Universitas Wijaya Putra jurusan Administrasi Publik pada tahun 2022.

Erwin memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang kepemiluan. Ia memulai karirnya sebagai Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada tahun 2005. Sejak saat itu, ia telah memegang berbagai posisi penting dalam pengawasan pemilihan, termasuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), juga Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten.

Pengalaman kepemiluannya yang paling menonjol termasuk menjadi Ketua Panwaskab Minahasa untuk

Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2014, serta Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Divisi HPP Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 dan Koordinator HP3S Bawaslu Kabupaten Minahasa tahun 2018.

Selain aktif dalam bidang kepemiluan, Erwin juga memiliki pengalaman organisasi yang beragam. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Tondano Utara dan Wakil Ketua Karang Taruna Indonesia Kabupaten Minahasa. Dalam lingkup gereja, ia pernah menjadi bagian dari Komisi Remaja GMIM Wilayah Tondano I, Ketua Pemuda GMIM Eben Haezer Wulauan Wilayah Tondano I, dan anggota Bidang PSDD Komisi Pemuda Sinode GMIM. Terakhir, ia juga terlibat dalam Pokja PKB GMIM periode 2014-2018 untuk Pendidikan Politik Warga Gereja.

Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kepemiluan yang ekstensif, dan keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi, Erwin Franklin Sumampouw telah membuktikan dedikasinya dalam bidang pengawasan pemilu dan pengembangan masyarakat di Sulawesi Utara.

Tentang Penulis



Prof. Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., S.H., M.Pd. Lahir di Taratara (Tomohon) 20 April 1983 adalah dosen di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Pada Tahun 2007, menyelesaikan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Pada Tahun 2024, menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik Universitas Terbuka. Pada Tahun 2011, menyelesaikan Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada tahun 2018, menyelesaikan Program Doktor pada Program Studi Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Pada saat ini penulis aktif membina mata kuliah: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, Pendidikan Civis, Isu-isu Kontemporer PPKn, Etika Kewarganegaraan, Filsafat Pancasila, Filsafat Sosial, Filsafat Ilmu, dan Filsafat Pendidikan. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian dalam bidang PPKn. Saat ini penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang PPKn. Sejak 1 Desember 2024 mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi untuk kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke
Guru Besar dalam bidang ilmu Sosiologi Kewarganegaraan.

SINOPSIS BUKU

Perihal Etika dan Integritas Pengawas Pemilu: Tantangan Kelembagaan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

Buku "Perihal Etika dan Integritas Pengawas Pemilu: Tantangan Kelembagaan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah" ini mengupas secara komprehensif tentang etika dan integritas pengawas pemilu dalam konteks pengawasan Pilkada di Indonesia. Dimulai dengan penjelasan mengenai urgensi pemilu dalam sistem demokrasi, buku ini kemudian membahas konsep etika dan integritas dalam pengawasan pemilu, serta hubungannya dengan efektivitas pengawasan. Penulis mengidentifikasi berbagai dilema etis yang dihadapi pengawas pemilu, termasuk potensi konflik kepentingan, tekanan politik, dan godaan suap.

Buku ini merupakan karya yang sangat penting dan relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Mari kita per kaya wawasan dan pemahaman kita tentang kompleksitas pengawasan Pilkada dengan membaca buku ini. Dengan memahami tantangan etika dan integritas yang dihadapi pengawas pemilu, kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat. Jangan lewatkan kesempatan untuk mempelajari analisis mendalam dan rekomendasi aplikatif yang ditawarkan oleh penulis demi masa depan demokrasi yang lebih baik di negeri kita!

DITERBITKAN OLEH:

PT. NALURI EDUKASI PRESS



**Jl. Piai Tengah Nomor 29, Kelurahan Piai Tengah,
Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat**